

Judul : Menkeu Pastikan Kredibilitas Fiskal
Tanggal : Jumat, 19 Agustus 2016
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 1

Menkeu Pastikan Kredibilitas Fiskal

Tim Bisnis
redaksi@bisnis.com

JAKARTA — Kementerian Keuangan memastikan RAPBN 2017 akan menjadi instrumen fiskal yang efektif dalam mengelola ekonomi dan memberi ruang lebih luas bagi sektor swasta.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, sebagai bagian dari instrumen fiskal, belanja difokuskan pada infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan. Alokasi belanja diarahkan pada sektor, di mana swasta tidak berani masuk karena risikonya besar, seperti sektor infrastruktur.

"Tidak semua belanja itu harus dari APBN. Buat kami yang penting adalah APBN tidak merusuh sektor rumah tangga dan swasta dapat beraktivitas," ujarnya dalam wawancara dengan *Bisnis*, Kamis (18/8).

Sementara itu, untuk menjaga penerimaan negara, pemerintah

memastikan akan menjaga kualitas reformasi pajak dengan tetap terbuka untuk mengkaji usulan yang berkembang di masyarakat mengenai wacana penurunan pajak penghasilan badan.

"Pandangan itu sangat logis karena kalau tarif tinggi kan meng-enforce lebih susah. Selama ini ada yang bicara kalau tarif rendah akan *comply*, ya tidak juga. Ada juga tarif rendah tapi tidak *comply*, karena pada dasarnya orang kan malas bayar pajak," ungkapnya.

Untuk itu, Kementerian Keuangan akan mengkaji terlebih dahulu berdasarkan informasi yang sebaik, seakurat, dan se-kredibel mungkin. "Bahwa ini

adalah proses politik, ya, tentu saja pemerintah harus bekerja sama dengan DPR. Paling tidak kalau datanya akurat dan kredibel, kita tidak membuat keputusan dengan informasi yang menyesatkan atau tidak realistis."

Terkait dengan pembiayaan, pemerintah juga menyiratkan upaya keras untuk pendalaman pasar keuangan guna membiayai defisit anggaran sebesar 2,41% dari PDB atau senilai Rp332,8 triliun. Langkah itu ditempuh agar perekonomian domestik tidak terlalu volatil ketika ada sentimen dari The Fed atau bank-bank sentral utama.

"Fungsi kita adalah membuat *financial sector* dan *capital market* menjadi dalam dan instrumennya banyak. Kalau goyangan datang, kita punya *absorber* yang banyak. Jadi itu yang APBN akan coba gunakan," jelasnya. 

Kalau goyangan datang, kita punya *absorber* yang banyak. Jadi itu yang APBN akan coba gunakan," jelasnya. 

Kalau goyangan datang, kita punya *absorber* yang banyak. Jadi itu yang APBN akan coba gunakan," jelasnya. 

Simak wawancara lengkap
Menkeu Sri Mulyani
di rubrik *Policy Talk*
edisi Senin (22/8).



Bisnis/Dedi Gunawan